

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tangguh dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strategi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, APBDes Desa Batu Putih telah dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan belum adanya transparansi informasi keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik masih diperlukan peningkatan keterlibatan masyarakat dan aksesibilitas informasi publik, meskipun akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan APBDes telah berjalan.

Kata Kunci : Pengelolaan APBDes, Akuntabilitas, dan Transparansi

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the degree of openness and accountability in Batu Putih Village, Pelawan District, Sarolangun Regency's Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) administration. The significance of accountable and transparent village finance management in achieving strong village administration and boosting public confidence in the village government serves as the study's backdrop. The method utilized in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data gathering strategies are carried out through interviews, observations, and documentation. According to the study's findings, Batu Putih Village's APBDes have been managed in compliance with legal requirements by following the phases of planning, implementation, recording, reporting, and accountability. However, in its implementation there are still various hurdles, such as low community participation in the planning process and the lack of transparency of financial information as a whole. According to the study's findings, greater village government still requires advancements in community involvement and public information accessibility, even though accountability and openness in the administration of APBDes have been in place.

Keywords: *APBDes Management, Accountability, and Transparency*